

# RENCANA STRATEGIS

**2020 - 2024**

(revisi 2021)

Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi

**BBPPMPV PERTANIAN**



**KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN**

DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN VOKASI

Jl. Jangari Km.14 Sukajadi,  
Karangtengah, Cianjur - Jawa Barat



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
PERTANIAN

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Rencana Strategis Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Pertanian (BBPPMPV) Pertanian telah direviu. Renstra BBPPMPV Pertanian disusun berdasarkan pada Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang berpedoman pada Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2025. Dalam proses penyusunannya, Renstra BBPPMPV Pertanian menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

Renstra ini ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan BBPPMPV Pertanian selama 5 (lima) tahun mendatang yang berfokus pada pencapaian tujuan strategis serta mengacu pada sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen ini diharapkan, menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Lembaga sebagai penggerak sektor pembangunan pendidikan bidang vokasi yang dapat mendukung pencapaian program pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan tahun hingga 2024.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mereviu Renstra BBPPMPV Pertanian Pertanian ini.



# DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL, GRAFIK, BAGAN dan GAMBAR.....	iii
RINGKASAN HASIL REVIU .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Kondisi Umum.....	4
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	16
<b>BAB II TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>25</b>
2.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan .....	27
2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran .....	28
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....</b>	<b>30</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi .....	30
3.2. Kerangka Regulasi .....	36
3.3. Kerangka Kelembagaan .....	38
3.4. Reformasi Birokrasi .....	41
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>43</b>
4.1. Target Kinerja .....	43
4.2. Kerangka Pendanaan .....	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# DAFTAR TABEL, GRAFIK, BAGAN DAN GAMBAR

Tabel 1.1. Capaian Kinerja PPPPTK Pertanian Periode Renstra 2014 – 2019 .....	5
Tabel 2.1. Tujuan Strategis BBPPMPV Pertanian tahun 2020 – 2024 .....	27
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Tujuan BBPPMPV Pertanian tahun 2021 - 2024 .....	28
Tabel 2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis BBPPMPV Pertanian .....	28
Tabel 2.4. Target Kinerja Sasaran Strategis BBPPMPV Pertanian Periode Renstra 2020 – 2024 .....	29
Tabel 3.1. Kerangka Regulasi Kemendikbud .....	36
Tabel 3.2. Komposisi SDM Berdasarkan jenjang Pendidikan .....	27
Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis BBPPMPV Pertanian Periode Renstra 2020 – 2024 .....	43
Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis BBPPMPV Pertanian 2020 .....	44
Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis BBPPMPV Pertanian 2021 – 2024 .....	44
Grafik 1.1. Capaian Dukungan Program Vokasi SMK 2019 .....	6
Grafik 3.1. Komposisi SDM Berdasarkan jenjang Pendidikan .....	41
Bagan 2.1. Tujuan Strategis BBPPMPV Pertanian tahun 2020 .....	14
Bagan 2.2. Tujuan Strategis BBPPMPV Pertanian tahun 2021 -2024 .....	15
Bagan 3.1. Struktur Organisasi BBPPMPV Pertanian (Permendikbud No. 26 Tahun 2020 dan SK Kepala BBPPMPV Pertanian No. 2121/B6.4/HK/2020).....	39
Gambar 1.1. 10 Poin paket Link and Match dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi .....	9
Gambar 1.2. Siklus Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian.....	12
Gambar 3.1. Skema Kebijakan Merdeka Belajar .....	31
Gambar 3.2. Tantangan Pendidikan Vokasi Masa Depan .....	35
Gambar 3.3. Arahan Dirjen Diksi .....	35
Gambar 3.3. Arahan Dirjen Diksi (2) .....	36

# RINGKASAN HASIL REVIU RENSTRA 2020 - 2024 (revisi tahun 2021)

---

## 1. BAB I

- Penambahan pada paparan pendahuluan
- Penambahan penjelasan tentang capaian kinerja PPPPTK Pertanian periode 2014-2019
- Penambahan penjelasan isu strategis
- Analisis SWOT

## 2. BAB II

- Perubahan pada Indikator kinerja Tujuan
- Perubahan pada Indikator kinerja sasaran (pembabakan target)

## 3. BAB III

- Penambahan pada penjelasan pengelolaan SDM

## 4. BAB IV

- Penyesuaian dengan BAB II
- Perubahan pada kerangka pendanaan

## 5. LAMPIRAN

- Perubahan pada Matriks Kinerja dan Pendanaan
- Penambahan Definisi Operasional, disesuaikan dengan IKK.

# BAB 1

---

## **PENDAHULUAN**



## BAB I PENDAHULUAN

“Memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja yang terlatih, terampil agar terserap semuanya ke dalam industri-industri”

---

Arahan Presiden dalam Percepatan Pembangunan SDM Unggul 2020-2024

---

Semangat percepatan pembangunan sumberdaya manusia Indonesia yang unggul pada fase pemerintahan kedua kepemimpinan Preseiden Joko Widodo periode tahun 2019–2024 menjadi pemantik kekuatan yang efektif baik secara institusional maupun individual. Dalam bingkai kelembagaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui unit pelaksana teknisnya (UPT) di lapangan berusaha untuk memastikan terjadinya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia sesuai dengan target yang telah direncanakan. Diantaranya melalui target capaian kualitas pembelajaran sehingga akan mampu menghasilkan pembelajar Pancasila. Derasnya perubahan yang melintasi babak revolusi industri 4.0 sebagai tonggak peradaban baru yang mengkolaborasikan kemampuan teknologi dengan kualitas intelegensia manusia diharapkan dapat melahirkan inovasi dan kreatifitas baru. Keselarasan paradigma digital yang harus dimiliki oleh setiap individu saat ini telah memaksa zaman untuk bergerak seacar disruptif. Oleh karena itu, saah satu tantangan cukup berat yang dihadapi adalah bagaimana menumbuhkembangkan keadaban baru yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman tanpa harus melupakan identitas dan budaya luhur Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan ber-bhineka tunggal ika.

Sebagai salah satu UPT Kemdikbud, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Pertanian dalam rentang perjalanan programnya terus berkomitmen untuk dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu dan berdaya saing sebagaimana tugas dan fungsi layanan yang digariskan. Transisi kewenangan di tingkat pusat beberapa kali dialami sejak dari Direktorat Jenderal Penjaminan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), hingga saat ini berada dibawah naungan Direktirat Jenderal Pendidikan Vokasi (DIKSI) cukup memberikan pengalaman dan kematangan dalam hal implementasi dan eksekusi berbagai

program dan kebijakan terkait dengan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Sesuai dengan peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kemendikbud, tugas utama BBPPMPV dalam pasal 11 adalah melaksanakan tugas Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang Pertanian. Selanjutnya dalam Pasal 12 dijelaskan fungsi BBPPMPV adalah sebagai berikut : (1) Penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; (2) Pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi; (3) Pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; (4) Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi; (5) Pengelolaan data dan informasi; (6) Pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; (7) Pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; dan (8) Pelaksanaan urusan administrasi. Secara ringkas kedelapan fungsi kelembangaan tersebut mengarah kepada tiga arus utama, yakni program fasilitasi peningkatan kompetensi bagi para pendidik dan tenaga kependidikan bidang vokasi pertanian, pembanguan jejaring kemitraan dalam rangka kolaborasi yang luas, serta penjaminan mutu yang terukur bagi pendidikan vokasi bidang pertanian untuk seluruh jenjang.

Dalam konteks fungsionalitas yang lebih terukur, BBPPMPV Pertanian menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi yang digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumennya agar lebih implementatif adalah Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 - 2024. Sementara itu, aktualisasinya diatur dalam Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa Unit Kerja Eselon II menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Eselon 1. Implikasi perubahan yang terjadi di tingkat Kementerian telah menghadirkan BBPPMPV Pertanian atau yang sebelumnya bernama Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Pertanian ini sebagai salah satu produk dari pengembangan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada

tahun 2020. Pengembangan OTK ini berdampak pada adanya restrukturisasi program Renstra Kemdikbud, menjadi periode 2020 dan periode 2021 - 2024. Pada Renstra tahun 2020, menggunakan struktur saat ini (PPPPTK Pertanian yang menginduk kepada Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan/GTK) karena program tahun 2020 sudah berjalan. Renstra periode 2021-2024 menggunakan struktur program baru (BBPPMPV Pertanian yang menginduk kepada Dirjen Pendidikan Vokasi).

Sebagai penjabaran dari Renstra Ditjen Pendidikan Vokasi, maka Renstra BBPPMPV Pertanian tentu saja memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Renstra ini diharapkan mampu menjadi penuntun atau pemandu program bagi setiap unit kerja di BBPPMPV Pertanian dalam kaitannya dengan pencapaian visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, program, kegiatan serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Lebih jauhnya dapat menjadi pedoman dalam menyusun: (1) Program Kerja Unit-unit Kerja internal; (2) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT); (4) Penetapan Kinerja (PK); (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berangkat dari hasil potret pengalaman implementasi program kerja beberapa tahun sebelumnya, lembaga memandang proses revitalisasi institusi menjadi kata kunci penting pada saat ini agar peningkatan kualitas kinerja dan performa kelembagaan dapat bergerak maju dan tumbuh menjadi lebih baik. Data menunjukkan SDM yang akan memasuki masa purna tugas, baik unsur struktural maupun fungsional cenderung meningkat. Sehingga perlu ada penyiapan segera dalam hal proses transformasi kader pelapis dan bahkan pengganti. Sementara itu keberadaan sarana dan prasarana oenunjang tugas dan fungsi utama lembaga pun nampaknya sudah perlu mengalam pembaruan mengingat usianya yang sudah tidak lagi muda. Setidaknya dapat diupayakan melalui strategi khusus dengan cara refungsionalisasi sarana prasarana atau bahkan lahan pendukung. Maka revitalisasi menjadi pilar penting dalam mendukung dan mendorong terjadinya perubahan dan peningkatan peran dan fungsi lembaga di tingkat Nasional. Selain itu, urgensi kemitraan dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja secara luas dan terbuka merupakan pintu masuk terjadinya kolaborasi guna memastikan tercapainya keselarasan dan kesepadanan (*link and match*) antara dunia pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, dunia usaha dan dunia kerja.

Globalisasi diartikulasikan sebagai kemampuan memproyeksikan kebutuhan dan beradaptasi dengan cepat serta efektif oleh institusi di masa kini menuju masa depan. Saatnya teknologi yang diperankan secara berdaya guna mendukung lahirnya pendidikan vokasi bidang pertanian yang adaptif terhadap dunia digital, yang bisa jadi akan lebih meraih simpati dan bahkan minat lebih luas dari kalangan generasi muda. Pada akhirnya, dunia pendidikan vokasi bidang pertanian mampu bersaing secara Internasional walaupun dengan potensi keunggulan lokal melalui langkah *re-branding* yang tepat, seperti mendekatkan kebiasaan manusia sekarang yang sangat intim dengan dunia internet untuk diorientasikan pada *Internet of Things* (IoT), komputasional dan digital. Maka eksistensi BBPPMPV Pertanian untuk terus memainkan perannya sebagai *think tank* bagi pendidikan vokasi pertanian di Indonesia tetap bisa terjaga secara konsisten baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Rumusan dasar yang tertuang di dalam BAB I Renstra BBPPMPV Pertanian ini terdiri dari 3 (tiga) nilai utama yaitu:

- (a) kondisi umum yang menjelaskan pencapaian dalam periode 2015-2019;
- (b) permasalahan yang masih dihadapi; dan
- (c) tantangan yang harus diatasi untuk menyukseskan pencapaian tujuan 2020-2024.

## 1.1. Kondisi Umum

### a. Capaian Renstra 2014 - 2019

Pelaksanaan tugas pokok PPPPTK Pertanian dalam meningkatkan kompetensi Pendidik bidang Pertanian telah dilaksanakan hingga tahun 2019. Sejumlah 7544 orang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi bidang Pertanian, dan 79.104 orang pendidik bidang lainnya. Untuk tenaga kependidikan sebanyak 7317 orang.



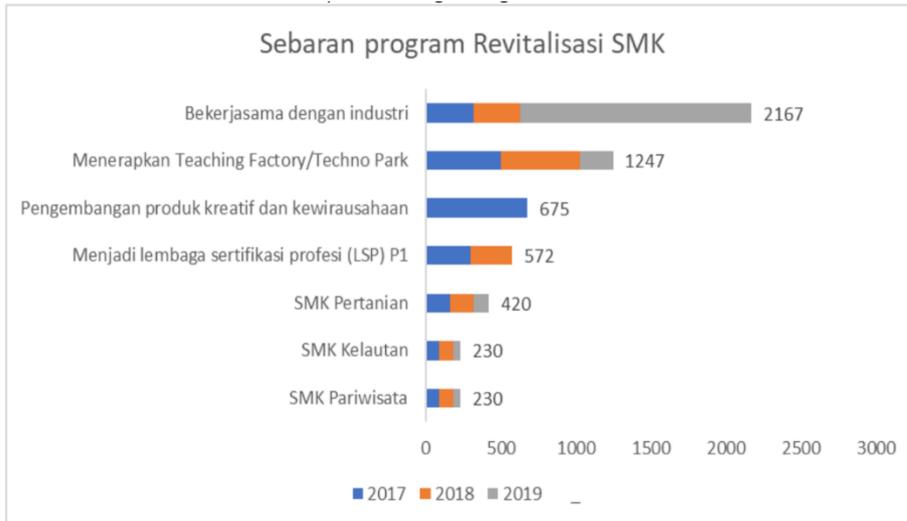
Suasana kegiatan Peningkatan Kompetensi bidang Pertanian

**Tabel 1.1.**  
**Capaian Kinerja PPPPTK Pertanian Periode Renstra 2014 – 2019**

INDIKATOR KINERJA	Capaian per tahun ( Orang)					Capaian Renstra 2014 – 2019 (orang)
	2014	2016	2017	2018	2019	
<b>1. Jumlah guru yang berkompeten bidang Pertanian</b>	201	2.835	2.432	271	1.805	<b>7.544</b>
<b>2. Jumlah guru yang berkompeten bidang lainnya</b>	274	36.528	320	26.760	15.222	<b>79.104</b>
<b>3. Jumlah tenaga kependidikan yang meningkat Kompetensinya</b>	1.256	305	208	719	4.829	<b>7.317</b>

Sumber: Laporan Kinerja PPPPTK Pertanian 2014 - 2019

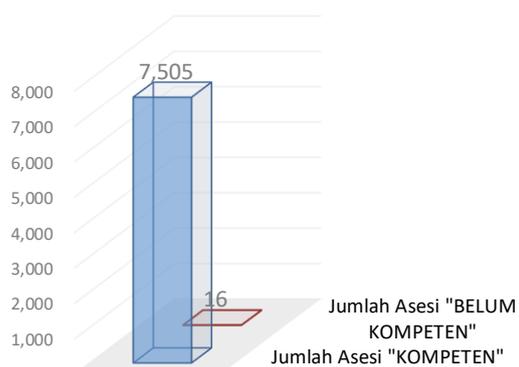
Sebagaimana diuraikan dalam Renstra Kemendikbud 2020-2024, bahwa salah satu prioritas pembangunan pendidikan di periode 2015-2019 adalah meningkatkan relevansi lulusan. Relevansi yang dimaksud disini adalah kesesuaian antara kualitas kompetensi yang dihasilkan oleh unit dan jenjang pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk menghasilkan lulusan yang relevan, peningkatan mutu pembelajaran dan perbaikan kualitas keluaran program pendidikan dan pelatihan wajib dilakukan. Fokus utama dari peningkatan relevansi ini adalah lulusan pendidikan menengah kejuruan atau SMK. Selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, Kemendikbud melakukan beberapa upaya agar lulusan SMK bermutu tinggi dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dan dapat menjawab persaingan global dan regional, seperti pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Oleh karena itu, program vokasi menjadi program prioritas Kemendikbud. Pada tahun 2018, Kemendikbud menetapkan empat bidang keahlian prioritas yaitu: kelautan, pariwisata, pertanian, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selain itu, program penguatan vokasi dilakukan dengan pendekatan *teaching factory/techno park*, kerja sama dengan industri, dan penyelarasan kejuruan dengan sertifikasi profesi.



**Grafik 1.1.**  
**Capaian Dukungan**  
**Program Vokasi**  
**SMK 2019**

Sumber: Direktorat PSMK

Koordinasi yang dilakukan antara PPPPTK Pertanian (BBPPMPV Pertanian) dengan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (yang saat ini berubah menjadi Direktorat Sekolah menengah Kejuruan) dalam rangka implementasi program Revitalisasi SMK dalam kurun kurang lebih 4 tahun terakhir telah mampu memetakan tingkat keberhasilan atau capaian program pembinaan dan penguatan SMK, terutama untuk SMK bidang Pertanian. Sebagaimana terlihat dalam grafik 1.1 diatas menggambarkan kontribusi PPPPTK Pertanian yang mendukung capaian program vokasi Kemendikbud tahun 2019, melalui pembinaan pada 420 SMK Pertanian melalui program Revitalisasi SMK.



Terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan SMK yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri, dunia usaha dan dunia kerja, diwujudkan melalui Program Keahlian Ganda (PKG) dan program peningkatan kompetensi

guru kejuruan. Program Keahlian Ganda bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi memberikan tambahan kompetensi baru yang berbeda dari kompetensi yang dikuasai sebelumnya. Guru yang telah mengikuti Program Keahlian Ganda mendapatkan sertifikat keahlian pendidik tambahan yang memberikan kewenangan untuk dapat mengampu mata pelajaran lain selain kompetensi keahlian yang sudah dimiliki dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan sertifikat keahlian dari Lembaga Sertifikasi Profesi. Sejauh ini 2.194 guru adaptif yang memiliki sertifikat keahlian ganda di bidang produktif sudah menjalani UKK yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) level IV oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). PPPPTK Pertanian merupakan salah satu dari 7 (tujuh) UPT Kemendikbud yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pihak kedua, sehingga dapat menyelenggarakan sertifikasi profesi. Melalui upaya tersebut, diharapkan berdampak pada hadinya lulusan SMK yang memiliki kompetensi kerja sesuai dan/atau relevan dengan kebutuhan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA).

#### **b. Isu Strategis**

Revitalisasi Pendidikan merupakan upaya yang lebih cermat, lebih gigih dan lebih bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan nasional sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Revitalisasi dalam konteks pendidikan dimaksudkan untuk memaksimalkan semua unsur pendidikan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Perusahaan Swasta) yang terkait untuk peduli secara riil dalam proses pendidikan SMK. Aspek akhlak mulia, moral dan budi pekerti perlu dimasukkan dalam pengembangan kebijakan, program dan indikator keberhasilan pendidikan melalui Revitalisasi SMK. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan merupakan rambu-rambu yang harus diikuti oleh setiap insan pendidikan kejuruan untuk melakukan perubahan.

Kemampuan individu dalam beradaptasi dengan kecakapan global melalui pemenuhan kompetensi abad ke 21 menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Secara umum

keterampilan abad 21 atau yang dikenal dengan *the 21st century skills* ini digambarkan menjadi 4C's skills (keterampilan 4 C, yang terdiri dari terampil dalam hal berkomunikasi (*communication*), kreativitas (*creativity*), Kolaborasi (*collaboration*) dan berfikir kritis (*critical thinking*). Aspek akhlak mulia, moral dan budi pekerti perlu dimasukkan dalam pengembangan kebijakan, program dan indikator keberhasilan pendidikan melalui Revitalisasi pendidikan vokasi.

Sebagai tindaklanjutnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara gamblang menginstruksikan untuk menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum pendidikan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*). Istilah "*Link and Match*" mengisyaratkan agar para lulusan mempunyai wawasan atau sikap kompetitif, seperti etika kerja (*work ethic*), pencapaian motivasi (*achievement motivation*), penguasaan (*mastery*), serta kemampuan dan sikap berkompetisi (*competitiveness*). Disisi lain dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan keterampilan abad ke 21, maka proses kesetaraan dan kesepadanan ini secara terbuka melihat aspek-aspek *common competencies* yang penting untuk dilihat sebagai kemampuan utama. Kemampuan memecahkan masalah, sanggup bekerja secara berkelompok, berfikiran terbuka serta toleran terhadap prinsip dan keyakinan orang lain adalah beberapa hal yang diyakini saat ini sebagai kompetensi penting untuk dimiliki oleh sumberdaya manusia, peserta didik dan lulusan, pendidikan vokasi. Oleh karena itu, terobosan ini memerlukan perubahan kerangka pikir dari seluruh pelaksana pendidikan baik institusi pendidikan maupun staf pengajar harus pro aktif mengembangkan *link* dan *match* dengan industri, dunia usaha dunia kerja.

Dalam rangka menciptakan relasi yang harmonis antara dunia pendidikan vokasi dengan lapangan pekerjaan, tentu saja diperlukan langkah-langkah taktis dan strategis serta mudah diterapkan oleh seluruh *stakeholder* pendidikan vokasi. Diawali oleh terjadinya sinkronisasi kurikulum pendidikan vokasi yang nyata dibutuhkan oleh industri, dunia usaha dan dunia kerja, hingga pada perlunya sertifikasi kompetensi yang dilakukan langsung oleh dan/atau berbasis industri. Adanya program peningkatan kompetensi guru yang terukur dengan pola pengajaran dan pendampingan langsung oleh mitra industri melalui program *upskilling* dan *re-skilling* berstandar industri adalah prioritas utama yang ingin dikerjar

dalam waktu dekat. Dilanjutkan aktifitas program praktek kerja industri atau magang yang teroganisasi dengan akurat melalui kolaborasi penyusunan konten kompetensi dengan dikuatkan oleh adanya alokasi waktu bagi keterlibatan narasumber/pengajar dari industri, dunia usaha dan dunia kerja secara aktif dan sistematis, bahkan hingga alokasi waktu yang dipersiapkan secara maksimal diakomodir langsung kedalam kurikulum pendidikan vokasi. Sehingga prosesnya secara terintegrasi akan dapat menghasilkan proses pendidikan vokasi yang mengacu pada pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) secara riil sesuai tuntutan yang pada akhirnya hal tersebut dapat menjadi jalan pembuka akan hadirnya komitmen kuat dari mitra industri, dunia usaha dan duia kerja dalam menyerap lulusan pendidikan vokasi. Oleh karena itu, beberapa poin utama kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Diksi menjadi wajib untuk direalisasikan oleh BBPPMPV Pertanian.



Gambar 1.1. 10 Poin paket *Link and Match* dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Terkait dengan kondisi dan isu strategis sebagaimana tertuang diatas, secara utuh Ditjen Diksi merilis beberapa target dan tujuan yang dapat dilakukan secara terpadu antara Unit Utama Ditjen Diksi dengan UPT di BBPPMPV. Diantara hal yang dimaksud dapat terlihat pada penjelasan di bawah ini:

- 1. Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antarlembaga pendidikan vokasi:** Sekolah penggerak (*center of excellence*) untuk memelopori inisiatif baru serta menjadi pusat

inovasi untuk kurikulum, pedagogi, dan manajemen sekolah. Selain itu, dalam rangka meningkatkan peran pendidikan vokasi dalam pembangunan sumber daya manusia perlu dilakukan *link and match* antara dunia pendidikan dengan DIDUKA. Salah satu langkah untuk mempercepat terwujudnya kebijakan *link and match* tersebut, perlu dibentuk Forum Pengarah Vokasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 09/D/HK.03.01/2020 yang diperbaharui dengan Nomor 33/D.D4/HK/2020.

- 2. Meningkatkan kualitas pendidik (guru/dosen/instruktur):** memperbaiki sistem rekrutmen dan tunjangan kinerja, meningkatkan kualitas pelatihan sesuai kebutuhan industri dan kompetensi, memetakan kebutuhan guru keahlian, serta mengembangkan komunitas/platform pembelajaran, melakukan pemagangan di dunia industri
- 3. Membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi untuk kepentingan pedagogi, penilaian dan administrasi:** berpusat pada siswa, interdisipliner, relevan, berbasis proyek, dan kolaboratif
- 4. Menyempurnakan kurikulum nasional, pedagogi dan penilaian:** penyederhanaan konten materi, fokus pada ilmu terapan yang terfokus pada kebutuhan dunia industri, pengembangan karakter berbasis kompetensi dan fleksibel
- 5. Penguatan tata kelola daerah:** peningkatan keterampilan dan pelatihan bagi pejabat daerah, pendekatan, konsultasi dan pendampingan dari pemerintah pusat yang berdasarkan kebutuhan, sekolah, serta peningkatan otonomi dan transparansi
- 6. Membangun sekolah/lingkungan belajar masa depan:** aman dan inklusif, memanfaatkan teknologi, kolaboratif, kreatif, dan system belajar berbasis pengalaman (*project based learning*)
- 7. Memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan:** meningkatkan keterlibatan dunia industri dalam pelaksanaan pendidikan vokasi, dana CSR, insentif pajak
- 8. Mendorong kepemilikan sekolah dan otonomi pendidikan kejuruan:** pihak industri atau asosiasi terlibat dalam penyusunan kurikulum, mendorong pembelajaran dan pembiayaan sekolah melalui sumbangan sektor swasta atau CSR

9. Membentuk **Pendidikan tinggi kelas dunia**: mempererat hubungan dengan industry, kemitraan global, sebagai pusat-pusat unggulan, serta universitas berjenjang yang lebih mandiri
10. **Simplifikasi mekanisme penjaminan mutu (internal maupun eksternal) dan memungkinkan adanya otonomi**: bersifat sukarela, berbasis data, merujuk pada praktik terbaik tingkat global, serta dilakukan oleh mitra industrinya

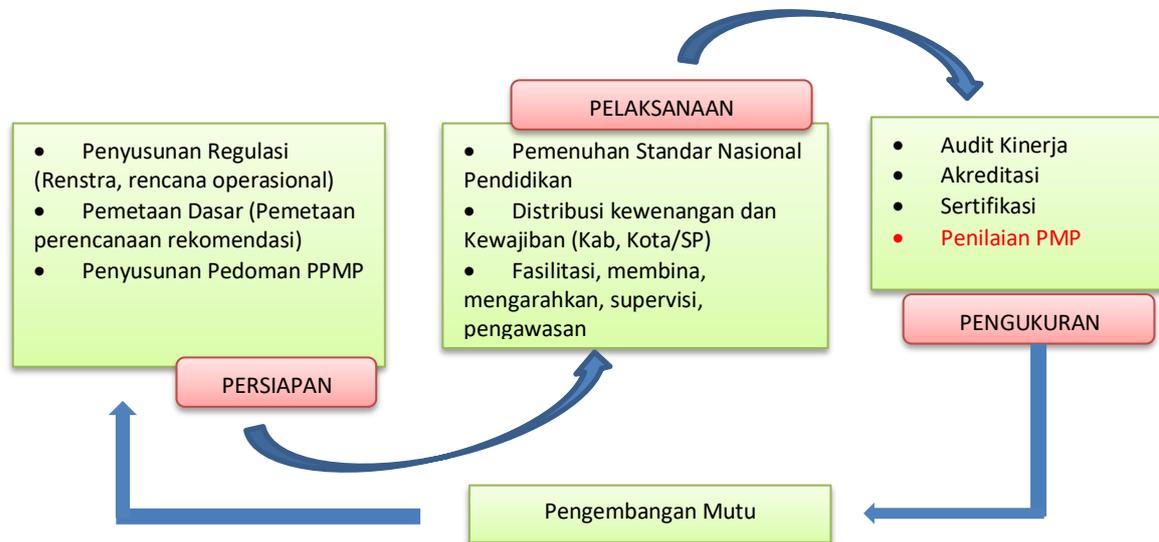
▪ **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan**

Penjaminan Mutu Pendidikan adalah serangkaian proses yang saling berkaitan dalam hal mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data tentang kinerja dan mutu pendidikan, tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan. Proses penjaminan mutu meliputi kegiatan mengidentifikasi aspek pencapaian dan prioritas peningkatan, penyediaan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan serta membantu membangun budaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Pencapaian mutu pendidikan, khususnya pendidikan vokasi pertanian dikaji berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Penjaminan mutu akan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Delapan SNP ini menjadi rujukan untuk mengkaji mutu pendidikan yang sebagian besar tanggung jawab implementasinya didelegasikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, yayasan dan sekolah.

Dalam ranah BBPPMPV, aktifitas penjaminan mutu (*Quality Assurance*) dilaksanakan secara terintegrasi pada setiap aktifitas program dan kegiatan. Mengingat pengalaman yang sudah berlangsung dalam hal penerapan manajemen mutu sudah sejak lama dimiliki. Dari mulai aktifitas program fasilitasi peningkatan kompetensi PTK sebagai *core business* utamanya, hingga kepada aktifitas layanan umum yang menjadi pendukungnya, lembaga sudah mengadopsi sistem penjaminan mutu tersebut. Sehingga tidak menjadi jika ingin menerapkan model atau sistem tersebut untuk diadopsi menjadi budaya mutu BBPPMPV Pertanian.

Penjaminan dan mutu pendidikan berkaitan dengan 3 aspek utama, yaitu (1) pengkajian mutu pendidikan, (2) analisis dan pelaporan mutu pendidikan, dan (3) peningkatan mutu dan penumbuhan budaya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Secara

ringkas sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia digambarkan dengan siklus berikut:



Sumber : Permendiknas No 63 Tahun 2009

Gambar 1.2. Siklus Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian

Berdasarkan gambar di atas, sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan siklus penjaminan dan peningkatan mutu secara terpadu dan berkelanjutan. Siklus tersebut dapat mengarahkan pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu secara internal dan eksternal. Implementasi siklus penjaminan dan peningkatan mutu di sekolah membutuhkan sumberdaya dan dukungan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, kota atau kabupaten, sehingga memungkinkan sistem ini dapat mendukung prioritas penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

BBPPMPV Pertanian bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi akan melaksanakan kajian terhadap mutu pendidikan Vokasi Pertanian, efektivitas program dan kegiatan penjaminan mutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing, yang pada tahap selanjutnya implementasi akan difokuskan pada penggunaan siklus penjaminan mutu untuk mengevaluasi mutu dan efektivitas kinerja di tingkat provinsi dan nasional.

### ▪ Paradigma Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan disebutkan ada 4 butir Paradigma Penjaminan Mutu Pendidikan, yaitu:

1. Pendidikan untuk semua bersifat inklusif dan tidak mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apapun. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang mengusung persamaan hak dalam pendidikan. Paradigma pendidikan ini memandang bahwa tidak boleh ada diskriminasi atas siswa yang berkebutuhan khusus dan keistimewaan.
2. Pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik yang memperlakukan, memfasilitasi dan mendorong peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang kreatif, inovatif dan berkewirausahaan. Pembelajaran sepanjang hayat adalah pembelajaran yang diselenggarakan secara terbuka sejak lahir sampai akhir hayat. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal. Pembelajaran seperti tidak dibatasi oleh waktu, tempat dan usia. Sifatnya fleksibel, lintas jalur dan multi makna.
3. Pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan pembangunan berkelanjutan, yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi rahmat bagi sekalian alam. Upaya penjaminan atau peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan dalam rangka menciptakan manusia yang *rahmatan lil 'alamin*. Manusia yang dapat memberikan rasa aman kepada semua unsur kehidupan. Manusia memberikan kelembutan dengan penuh kasih dan sayang kepada semua manusia yang ada di bumi. Manusia yang tidak menjadi perbedaan sebagai alasan untuk menindas orang lain, makhluk lain dan tidak merusak lingkungan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan secara berkelanjutan.

## ▪ Prinsip dan Acuan Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Prinsip pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan perlu menerapkan beberapa hal penting yang sifatnya melekat (*embedded*) dan berkelanjutan (*sustainable*), yaitu:

### 1. Keberlanjutan

Penjaminan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan. Kegiatan penjaminan mutu yang berkelanjutan berarti suatu kegiatan yang berlangsung tanpa berhenti. Prinsip ini memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dimasa sekarang dan yang akan datang. Penjaminan mutu bermula dari akhir dan berakhir diawal. Hal ini memiliki makna bahwa hasil akhir dari proses penjaminan mutu digunakan sebagai masukan awal untuk mengembangkan program jaminan mutu berikutnya.

### 2. Terencana dan sistematis

Penjaminan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan prinsip terencana dan sistematis. Prinsip ini mengandung maksud bahwa penjaminan mutu yang dilakukan dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur. Capaian mutu ditargetkan dalam tiap-tiap rentang waktu tertentu. Berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi tujuan mutu senantiasa dipikirkan. Selain itu, solusi-solusi yang dibutuhkan dicari sesuai dengan persoalan yang kemungkinan muncul.

### 3. Menghormati Otonomi Sekolah

Penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan dengan tetap menghormati otonomi sekolah. Otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan aspirasi kepentingan nasional yang berlaku. Dalam pelaksanaan otonomi sekolah harus menerapkan prinsip demokratis, dan pengambilan keputusan dilakukan secara partisipasi. Pengambilan keputusan secara partisipatif adalah cara pengambilan keputusan dengan menciptakan lingkungan yang terbuka dan demokratis dimana warga sekolah didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang akan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah.

#### 4. Fasilitas pembelajaran informal

Upaya penjaminan mutu pendidikan berpedoman pada penerapan prinsip bahwa sekolah memberikan fasilitas pembelajaran informal untuk pendidikan berkelanjutan. Pembelajaran informal merupakan pembelajaran yang dilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar berupa kegiatan belajar mandiri. Pembelajaran ini dilakukan secara sadar dan teratur tetapi tidak terlalu ketat dengan peraturan-peraturan tetap seperti pada pembelajaran formal. Pembelajaran informal perlu diperhatikan karena ikut menentukan keberhasilan pembelajaran dalam pendidikan formal. Sekolah perlu berperan dalam mewarnai lingkungan informal siswa. Lingkungan informal perlu diintervensikan agar selaras dengan tujuan pendidikan formal disekolah.

#### 5. Keterbukaan (transparansi)

Keterbukaan atau transparansi merupakan suatu keadaan yang tidak tertutup atau tidak rahasia. Keadaan semacam ini memberikan peluang kepada semua pihak untuk mengetahui informasi. Transparansi juga berarti jelas, mudah dipahami atau tidak meragukan. Keterbukaan merujuk pada tindakan yang memungkinkan segala sesuatu menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak diragukan kebenarannya. Prinsip keterbukaan sangat penting untuk penyempurnaan sistem. Dengan adanya keterbukaan memungkinkan pemberian informasi untuk keperluan refleksi.

Prinsip-prinsip diatas akan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan dan menjamin mutu pendidikan dengan mengacu pada beberapa hal di bawah ini :

1. **Reliability**, yaitu kepercayaan pemakaian jasa pendidikan .
2. **Assurance**, yaitu keterjaminan program pendidikan yang ditawarkan.
3. **Tangible**, yaitu kebersihan, kesehatan, kerapian, keteraturan dan kenyamanan lingkungan pendidikan.
4. **Empathy**, yaitu perhatian terhadap aspirasi dan kebutuhan pelanggan pendidikan.
5. **Responsiveness**, yaitu tanggap terhadap keluhan pemakai jasa pendidikan.

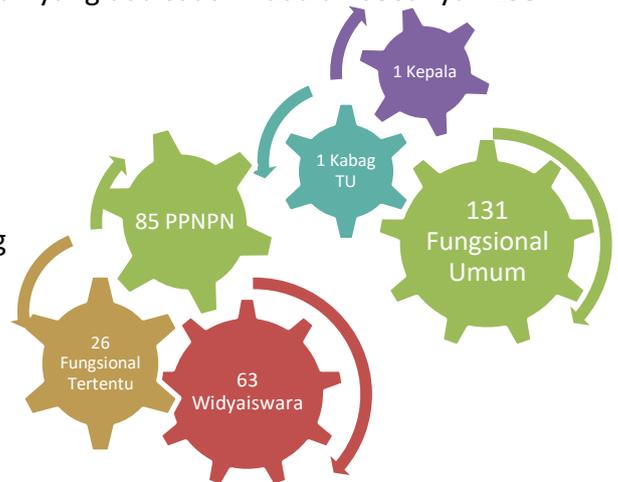
## 1.2. Potensi dan Permasalahan

### a. Potensi

#### A. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya sebagai lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang pertanian, BBPPMPV didukung oleh SDM yang cukup memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Jumlah SDM BBPPMPV Pertanian yang ada saat ini adalah sebanyak 299 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Balai Besar : 1 orang
2. Kabag TU : 1 orang
3. Widyaiswara : 59 orang
4. JAbatan Fungsional Tertentu : 26 orang
5. Fungsional Umum : 131 orang
6. PPNPN : 85 orang

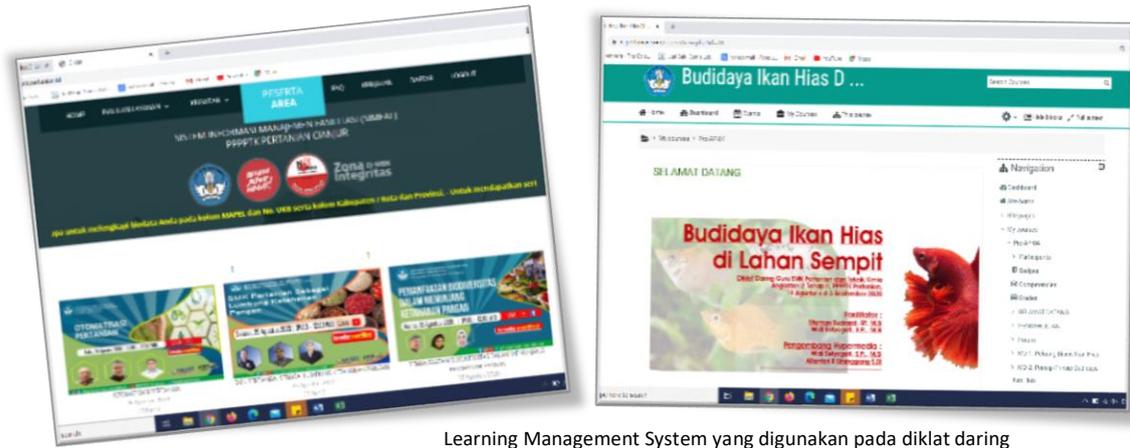


#### B. Fasilitas



Sebagai lembaga yang bertugas untuk peningkatan kompetensi Guru dan tenaga Kependidikan bidang Pertanian, BBPPMPV Pertanian memiliki ragam fasilitas pendukung, dari mulai fasilitas teori, praktik hingga terapan. Sumber belajar untuk mendukung kegiatan Pengembangan

dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang ada berupa Perpustakaan yang telah dilengkapi oleh berbagai sumber belajar antara lain berupa perpustakaan dengan jumlah koleksi buku sebanyak 5638 judul, 178 CD pembelajaran, serta katalog online dengan link <http://perpus-pertanian.kemdikbud.go.id/> dan Aplikasi repository online : <http://repositori.kemdikbud.go.id/>. Laboratorium Komputer sebanyak 2 unit dengan kapasitas 48 komputer; Ruang belajar yang nyaman sebanyak 18 Kelas dengan kapasitas



Learning Management System yang digunakan pada diklat daring

20 orang perkelas, Fasilitas Audio/ Sound System pada masing-masing kelas, fasilitas layanan Koneksi internet dengan kecepatan 170 Mbps dan Aplikasi Administrasi online / Simfal: ppptk.pertanian.id.

**C. Fasilitas pendukung lainnya**

Fasilitas pendukung yang dimiliki BBPMPV Pertanian berupa; Asrama dengan kapasitas : 250 Orang, Masjid, Mushola, Toilet, Klinik beserta Sarana pendukung protokol Kesehatan selama masa Pandemi (tempat cuci



tangan, semprot kendaraan dan staff), Parkiran Luas dan aman, Ruang tunggu dengan bahan bacaan, Poliklinik, Kamar Laktasi, Toilet untuk orang Berkebutuhan Khusus, Kursi roda, Tempat Parkir untuk orang kebutuhan khusus, kolam renang, wahana bermain (*Playground*) untuk anak, Jalur khusus untuk kebutuhan khusus, Lahan tanam, Kebun



Fasilitas Asrama (kamar dan restoran) yang nyaman, Ruang Laktasi Lengkap, Lahan Parkir yang memadai serta Fasilitas perkantoran ramah difabel.

Praktik, Kolam ikan, Kandang, Bengkel, Lapangan olahraga, Ruang kebugaran (*Fitness*), dan Kantin..



Ruang Sidang, Ruang Teori, Ruang *Fitness*, Ruang Kantin dan Ruang Serba Guna

#### D. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal yang berpengaruh positif merupakan “peluang” bagi BBPPMPV Pertanian dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai Visinya. Peluang yang dimaksud adalah:

- a. Komitmen pemerintah untuk memenuhi anggaran pendidikan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 13/PUU-VI/2008 sesuai dengan amandemen ke 4 UUD 1945 pasal 31 ayat 4 yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- b. Kuatnya dukungan lembaga legislatif dan pemerintah terhadap pembangunan pendidikan, khususnya peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru.

- c. Belum semua satuan pendidikan memiliki Pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai seperti Guru, Dosen, Instruktur, teknisi, pustakawan, tenaga laboratorium, Kepala sekolah dan pengawas yang berlisensi.
- d. Meningkatnya tuntutan sertifikasi kompetensi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan IDUKA atau pihak ketiga.
- e. Besarnya komitmen masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan pendidikan antara lain melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- f. Kemajuan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) membuka peluang terhadap pengayaan materi ajar menjangkau daerah-daerah yang terpencil sehingga dapat mendukung efisiensi pengelolaan e-administrasi pendidikan.

Kondisi eksternal yang dapat menghambat yang dapat dikategorikan sebagai “ancaman” bagi BBPPMPV Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah:

- a. Kenaikan anggaran pendidikan melalui APBN sebesar 20% tidak berbanding lurus dengan peningkatan kompetensi serta Kinerja Guru dan tenaga Kependidikan. Kenaikan anggaran pendidikan lebih banyak untuk keperluan pemenuhan tunjangan profesi Guru, Kepala sekolah dan Pengawas. Namun demikian tunjangan profesi tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja Guru, Kepala sekolah dan Pengawas.
- b. Otonomi yang luas kepada daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diatur kembali dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pendidikan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat kemudian dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kondisi ini berdampak kepada adanya kewenangan Pemerintah daerah untuk mengatur sendiri bagaimana meningkatkan mutu PTK-nya, sementara itu koordinasi dan sinkronisasi program dengan pemerintah daerah memerlukan biaya dan waktu serta tantangan tersendiri.

## b. Permasalahan

Besarnya target sasaran program serta luasnya cakupan tanggungjawab yang diemban oleh BBPPMPV Pertanian merupakan tantangan yang harus dihadapi. Sehingga dengan segenap potensi, kemampuan dan fasilitas pendukungnya semua pihak secara professional dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing. Daya dukung anggaran menjadi hal yang sangat penting jika melihat beban kerja serta cakupan wilayah garapannya. Sebagai gambaran, guna melayani sebanyak lebih dari 12 ribu dan lebih dari 2 ribu SMK bidang pertanian serta Tenaga Kependidikan lainnya, setidaknya setiap tahun dibutuhkan anggaran sebanyak 200 milyar apabila target okupansi sebanyak itu ingin dicapai dalam rentang waktu 5 tahun berjalan sesuai dengan jumlah pembabakannya pada angka rata-rata normal sebesar 20-25 % per tahun. Akan tetapi faktanya beban program serta target okupansi tersebut belum selaras dengan alokasi anggaran yang diberikan. postur anggaran yang tersedia masih berada jauh dibawah ekspektasi, sehingga rasio keberhasilan pencapaian target sasaran program pun agak berat dan tertatih.

Dilain pihak akibat dari posisi BBPPMPV Pertanian sebagai salah satu UPT Kemdikbud dibawah Ditjen Diksi, menjadikan unit utama di atasnya bisa secara langsung dapat mengintervensi proses eksekusi program. Tugas pokok dan fungsi yang bersifat *mandatory* dalam kaitannya dengan instruksi penuntasan capaian program yang dikeluarkan oleh Ditjen Diksi harus dapat dintuntaskan secara parallel dengan program kerja yang dimiliki oleh BBPPMPV. Maka perlu strategi dan pengelolaan cerdas dalam mengawal dan memastikan semuanya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai harapan. Meskipun kadang-kadang hal tersebut dapat menjadi beban kerja tambahan (*overloaded work*) yang cenderung dapat memberatkan.

**c. Analisis Masalah**

Berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal BBPPMPV dapat diidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi agar dapat segera diantisipasi langkah yang tepat dalam melaksanakan Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang Pertanian dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan meliputi Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Acaman, sebagaimana tercantum dalam tabel analisis dibawah ini.

S	W	O	T
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lahan pengembangan pendidikan dan pelatihan pertanian yang cukup luas.</li> <li>▪ Sarana dan prasarana diklat yang memadai.</li> <li>▪ Kompetensi fasilitator diklat (widyaiswara, PTP, teknisi, laboran, dan fungsional lainnya) yang sangat berpengalaman.</li> <li>▪ Asesor kompetensi keahlian yang berlisensi dan diakui secara Nasional.</li> <li>▪ Budaya dan lisensi sistem manajemen mutu terakreditasi.</li> <li>▪ Kesiapan fasilitasi peningkatan kompetensi menuju proses <i>hybrid learning and training</i>.</li> <li>▪ Penerimaan yang sangat baik dari keluarga besar SMK Pertanian dan Teknik Kimia yang kembali di bawah payung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regenerasi posisi jabatan fungsional tertentu yang bertugas sebagai fasilitator diklat (widyaiswara, PTP) yang sangat terlambat.</li> <li>▪ Jejaring kemitraan bidang pertanian yang tidak banyak.</li> <li>▪ Literasi digital (teknologi) yang tidak merata.</li> <li>▪ Sistem inventarisasi dan tabulasi data yang masih harus diperbaiki.</li> <li>▪ Alokasi jumlah partisipan diklat yang sangat terbatas.</li> <li>▪ Alokasi anggaran yang masih kecil</li> <li>▪ Fluktuasi dari keberadaan unti percontohan produksi sebagai penunjang paket pelatihan sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah SMK bidang Pertanian seluruh Indonesia sebanyak 2.017</li> <li>▪ Struktur kelmbagaan baru yang masih fresh.</li> <li>▪ Revitalisasi pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan vokasi pertanian.</li> <li>▪ Rekonstruksi dan perancangan desain kurikulum diklat yang sangat dinamis.</li> <li>▪ Domain garapan yang lebih luas terdiri dari SMK, PT Vokasi, dan LKP.</li> <li>▪ Digitaliasi layanan Diklat.</li> <li>▪ Menciptakan tren pertanian yang modern dan menyenangkan., melalui model <i>smart ingrated farming</i>.</li> <li>▪ Desain pengembangan diklat berbasis keterampilan abad ke 21.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masa transisi pandemi global Covid-19 yang tidak jelas akhirnya.</li> <li>▪ Pengurangan SDM fasilitator diklat (widyaiswara, PTP, teknisi, laboran, dan fungsional lainnya) yang akan pension massal.</li> <li>▪ Pendidikan Vokasi bidang pertanian dan teknik kimia yang didampingi (SMK-PTV-LKP) belum memenuhi standar.</li> <li>▪ Tingkat pengangguran terdidik dihasilkan oleh pendidikan menengah kejuruan (SMK). Berdasarkan data BPS.</li> <li>▪ Kesenjangan mompetensi (<i>competency gap</i>) yang masih terjadi di lingkungan internal.</li> </ul>

**S**

- pembinaan oleh BBPPMPV Pertanian.
- Memiliki peta jalan pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi bidang Pertanian dan teknik Kimia yang terukur.
- Komitmen pimpinan dan seluruh warga BBPPMPV Pertanian dalam upaya memajukan layanan fasilitasi peningkatan kompetensi dan pendampingan pengembangan pendidikan vokasi pertanian.

**W**

- Responsifitas institusi terhadap kebutuhan pasar industri, dunia usaha dan dunia kerja yang masih kurang kuat.
- Penggunaan KKNI sebagai rujukan dalam menyusun kurikulum diklat yang masih termarginalkan.

**O**

- *Upgrade* sarana dan parsarana pendukung fasilitasi peningkatan kompetensi PTK bidang pertanian.
- *Link and match* antara BBPPMPV Pertanian dengan SMK dan IDUKA.
- Kolaborasi Riset terapan antara BBPPMPV P – SMK – IDUKA.
- Pengembangan model *teaching/learning factory* di pendidikan vokasi bidang pertanian.
- Menjadi *Center of Excellent* bagi pendidikan vokasi pertanian.
- Inovasi bidang pertanian

**T**

Dari analisis di atas, beberapa permasalahan yang sekaligus juga merupakan tantangan (*challenges*) dapat digambarkan sebagai potensi di masa depan adalah :

- 1) Peningkatan SDM Widyaiswara dan teknisi baru yang profesional dan menguasai teknologi pertanian modern.
- 2) Pengakuan kompetensi keahlian Widyaiswara melalui sertifikasi oleh IDUKA.
- 3) Merevitalisasi sarana dan prasarana diklat.
- 4) Mensinkronisasi Renstra Diksi dengan Tusi BBPPMPV Pertanian.
- 5) Paradigma fasilitasi peningkatan kompetensi yang mengarah ke *blended learning* atau *hybrid learning*.
- 6) Implementasi model pembelajaran Keterampilan Abad ke 21 (*21<sup>st</sup> Century Skills*)
- 7) Merekonstruksi proses Pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based learning*)
- 8) Meningkatkan kompetensi Literasi TIK SDM;
- 9) Membangun komunitas guru bidang keahlian produktif di setiap daerah.
- 10) Membangun komunitas guru adaptif-normatif terapan SMK pertanian disetiap daerah.
- 11) Membantu Ditjen Vokasi dalam menghasilkan (memproduksi) dan mendistribusikan Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas.
- 12) Meningkatkan peran Dinas Pendidikan provinsi dalam peningkatan kompetensi Guru.
- 13) Meningkatkan peran BBPPMPV Pertanian dalam pembinaan Guru Pertanian.
- 14) Mengadaptasi kecakapan global melalui pengembangan platform layanan berbasis Digital society 5.0.
- 15) Penyelarasan SMK dengan IDUKA.
- 16) Peran pembinaan manajemen sekolah oleh BBPPMPV Pertanian kepada SMK Pertanian.
- 17) Keterlibatan praktisi IDUKA dalam memberikan pengajaran di SMK.
- 18) Sinkronisasi kurikulum Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi Pertanian antara BBPPMPV Pertanian dengan IDUKA.
- 19) Pemerataan akses bagi SMK swasta dan SMK Negeri.
- 20) Kolaborasi Riset terapan antara BBPPMPV P – SMK – IDUKA.
- 21) Penyelarasan pembelajaran dalam pencapaian kompetensi *hard skill* dan *soft skill* bidang keahlian pertanian.
- 22) Menciptakan tren pendidikan pertanian modern dan menyenangkan.
- 23) Melahirkan Enterpreur muda bidang pertanian.
- 24) Integrasi kurikulum adaptif-normatif-produktif kedalam proses pembelajaran.
- 25) Pengembangan model *teaching/learning factory* di pendidikan vokasi bidang pertanian.
- 26) Pengadaan kekurangan SDM Widyaiswara dan teknisi baru
- 27) Masih terdapat SMK Pertanian berdasarkan penilaian belum sesuai dengan SNP SMK.
- 28) Pemerataan kompetensi guru, akses pendidikan, akses informasi termasuk internet dan teknologi pertanian pada SMK pertanian yang umumnya ada di wilayah pedesaan.

- 29) Profil dan promosi SMK pertanian yang umumnya ada di wilayah pedesaan.
- 30) Pengembangan dan implementasi pembelajaran dalam pencapaian kompetensi *hard skill* dan *soft skill* yang otonom, terintegrasi, suplemen dan kolaborasi secara konsisten, dan berkelanjutan.
- 31) Lulusan SMK belum banyak terserap bekerja di IDUKA yang sesuai bidangnya.
- 32) Lemahnya kemampuan berwirausaha, terutama wirausaha bidang pertanian.
- 33) Ada perbedaan yang signifikan antara Budaya Kerja di Sekolah dan IDUKA.
- 34) Ada pergeseran teknik pembelajaran konvensional ke arah digital (virtual).
- 35) Ada sebagian daerah yang masih tergolong daerah 3T.
- 36) Lemahnya sistem tabulasi dan inventarisasi data.
- 37) Kemampuan yang belum merata dalam merespons pembelajaran keterampilan Abad ke 21.



# BAB 2

---

## **TUJUAN DAN SASARAN**



## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) tahun 2020, serta UPT pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen DIKSI) tahun 2021 – 2024, pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka BBPPMPV Pertanian mendukung sepenuhnya visi dan misi Kemendikbud 2020 – 2024, yaitu

*“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebhinekaan global”*

Misi Kemendikbud yang merupakan salah satu tugas dari BBPPMPV Pertanian sebagaimana tertuang dalam misi pertama, yaitu:

*“Mewujudkan Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.”*

Misi renstra Kemendikbud 2020-2024 dapat dimaknai sebagai berikut: Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi adalah proses Pendidikan harus mampu menjawab tantangan atas perubahan tren globalisasi yang demikian pesat. Peningkatan relevansi lulusan pendidikan vokasi (SMK) mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, Kemendikbud melakukan beberapa upaya agar lulusan SMK bermutu dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri (DUDI) dan dapat menjawab persaingan global dan regional. Pendidikan sebagai factor utama pembentukan SDM sebagai ikhtiar mencetak generasi unggul, bermutu serta berkelanjutan merata diseluruh penjuru tanah air. Tentu dalam proses Pendidikan mesti didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan yang layak berstandar serta sesuai dengan sasaran pembentukan kompetensi yang diampunya. (Renstra Ditjen. Pendidikan Vokasi 2020-2024, halaman 24)

Tata nilai yang dianut dan disepakati oleh seluruh anggota organisasi yang harus dijadikan motto bagi seluruh anggota organisasi dalam bekerja dan berhubungan satu sama lainnya menekankan pada aspek manusia sebagai pelaku organisasi. Norma yang menjadi tata nilai dasar yang telah dianut dan akan terus dipertahankan adalah **“versatile, dedicated and caring”**. Secara filosofis nilai-nilai tersebut diorientasikan pada upaya mencapai visi

dan misi BBPPMPV Pertanian dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

***Versatile***

- Cakap : bekerja ikhlas, cerdas, berhasil dan tuntas
- Profesional : kompeten, jujur, menggandrungi keunggulan yang dimiliki

***Dedicated***

- Loyal : konsisten terhadap pekerjaan
- Disiplin : tepat waktu dan taat peraturan
- Tanggung jawab : memiliki komitmen terhadap pekerjaan

***Caring***

- Peduli : tanggap terhadap kondisi, kebutuhan dan kepentingan Lembaga, sesama dan masyarakat

Renstra BBPPMPV Pertanian tahun 2020-2024 menjadikan tata nilai utama Kemendikbud sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Kemdikbud 2020-2024 sebagai acuan dalam rangka memandu aktifitas organisasi dan pegawai memenuhi tugas dan tanggungjawab yang sedang dilaksanakan. Tata nilai BBPPMPV Pertanian yang dimaksud mengacu pada tata nilai Kemendikbud 2020– 2024 adalah:

**1. Memiliki Integritas**

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.

**2. Kreatif dan Inovatif**

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.

**3. Inisiatif**

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah.

**4. Pembelajaran**

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian.

**5. Menjunjung Meritokrasi**

Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

## 6. Terlibat Aktif

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

## 7. Tanpa Pamrih

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi, dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan dalam mencapai visi dan misi tersebut, maka BBPPMPV Pertanian perlu menyusun Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan.

### 2.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Berdasarkan rujukan yang diambil dari Sasaran Program Ditjen GTK dan Ditjen DIKSI, maka BBPPMPV Pertanian menetapkan tujuan strategis, agar dapat menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya visi dan misi dengan lebih jelas. Lebih spesifik dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini.

**Tabel 2.1.**  
**Tujuan Strategis BBPPMPV Pertanian tahun 2020 – 2024**

SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL	TUJUAN STRATEGIS BBPPMPV Pertanian
2020 (DITJEN GTK)	2020
Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional	Peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan
2021 – 2024 (DITJEN DIKSI)	2021 – 2024
<b>SP 1.</b> Meningkatnya Jumlah Lulusan Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi yang Memperoleh Pekerjaan dan Berwirausaha Dalam Satu Tahun Setelah Kelulusan	<b>TS1.</b> Meningkatnya Jumlah Lulusan Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi yang Memperoleh Pekerjaan Dan Berwirausaha Dalam Satu Tahun Setelah Kelulusan
<b>SP5.</b> Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas	<b>TS3.</b> Menguatnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas

**Bagan 2.2.**  
**Indikator Kinerja Tujuan BBPPMPV Pertanian tahun 2020 -2024**

TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2020/2024
<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
Peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan	100%
<b>2021-2024</b>	<b>2021-2024</b>	<b>2021-2024</b>
<b>TS1.</b> Meningkatnya Jumlah Lulusan Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi yang Memperoleh Pekerjaan Dan berwirausaha Dalam Satu Tahun Setelah Kelulusan	1. Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	60%
	2. Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR	70%
<b>TS3.</b> Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas	3. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB	87
	4. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	98

## 2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Selanjutnya, untuk mengetahui ketercapaian tujuan strategis, maka perlu dijabarkan ke dalam sasaran strategis sehingga tujuan strategis lebih terukur. Sasaran Strategis ini menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra. BBPPMPV Pertanian telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sepanjang periode Renstra 2020 - 2024 dan akan menopang ketercapaian sasaran strategis Ditjen Pendidikan Vokasi. Untuk itu, penyusunan sasaran strategis BBPPMPV Pertanian harus berpedoman pada sasaran strategis Ditjen Pendidikan Vokasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi BBPPMPV. Secara rinci, perwujudan tujuan strategis yang dijabarkan kedalam sasaran kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan diatas, ditetapkan target capaiannya selama 5 tahun sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis BBPPMPV Pertanian**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
<b>2020 (DITJEN GTK)</b>		<b>2020</b>
Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan (SK)	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak	3.610 orang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
2021 – 2024 (DITJEN DIKSI)	2021 – 2024	2024
SS 1. Meningkatnya jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri	IKS 1. Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan Upskilling dan Reskilling berstandar Industri	2.846 orang
	IKS 2. Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri	660 orang
	IKS.6. Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan Teaching Factory	92 model
SS 4. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	IKS 8. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal predikat BB	BB
	IKS 9. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	93,5

**Tabel 2.4.**  
**Target Kinerja Sasaran Strategis BBPPMPV Pertanian**  
**Periode Renstra 2020 – 2024**

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan (2020)</b>						
IKS Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak	orang	3.610	-	-	-	-
<b>SS 1. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi berbasis kerja sama industri (2021 – 2024)</b>						
IKS 1. Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan <i>Upskilling</i> dan <i>Reskilling</i> berstandar Industri	Orang	-	640	686	734	786
IKS 2. Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri	Orang	-	330	110	110	110
IKS.6. Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	Model	-	20	22	24	26
<b>SS 2. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi (2021 – 2024)</b>						
IKS 7. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	78	80	82	85	87
IKS 8. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Predikat	93	94	95	95	98

# BAB 3

---

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**



## BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi sebagaimana tertuang dalam Renstra Kemendikbud 2020 - 2024 mengacu pada RPJMN 2020 - 2024, mendasarkan pada sembilan agenda prioritas (NAWA CITA KEDUA) untuk Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Kesembilan agenda prioritas (NAWA CITA KEDUA) tersebut, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Selanjutnya, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024, serta melalui arahan presiden dalam rangka percepatan pembangunan SDM Unggul tahun 2020 – 2024 antara lain; 1) Memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja yang terlatih, terampil agar terserap semuanya ke dalam industri – industri, 2) Pendidikan Tinggi, Pendidikan Kejuruan, SMK di daerah – daerah, dihubungkan dengan industri agar lulusannya sesuai dengan kebutuhan, dan siap untuk hal – hal yang baru.

Secara lebih detail, Kemendikbud mencanangkan **Kebijakan Merdeka Belajar** untuk mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Gambar berikut.



Sumber: Peta Jalan Pendidikan Indonesia, 2020

Gambar 3.1. Skema Kebijakan Merdeka Belajar

Dalam kaitannya dengan kebijakan Merdeka Belajar, maka BBPPMPV Pertanian akan turut berkiprah untuk mensukseskannya sehingga tercapai pada tahun 2024. Merujuk pada Renstra Kemendikbud 2020-2024, maka secara garis besar, arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan BBPPMPV Pertanian adalah sebagai berikut:

### 1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan angka partisipasi pendidikan adalah: Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun tuntas dan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun meningkat;

Strategi yang dilakukan Kemendikbud yaitu membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun

### 2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan adalah:

- kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merata dan meningkat;
- penjaminan mutu semakin kuat dan bermakna;
- pendidikan dan pelatihan vokasi yang berkualitas dan diakui industry;

Strategi yang dilakukan Kemendikbud:

- a. mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui skema Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak;
- b. mengembangkan Balai Guru Penggerak (Center of Excellence) di setiap provinsi untuk menciptakan ekosistem belajar guru yang berdaya, aktif, kolaboratif, inklusif, berkelanjutan dan inovatif sehingga dapat menunjang pembelajaran siswa di sekolah;
- c. mengoptimalkan keterlibatan DU/DI secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi guna mendorong mutu ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi berstandar industri, seperti: kurikulum, fasilitas pendidikan dan pelatihan, kapasitas guru/instruktur/pelatih/dosen, magang, asesmen dan uji kompetensi;
- d. mengembangkan lembaga akreditasi mandiri yang melibatkan pengguna (DU/DI, profesi, asosiasi) dan berstandar internasional serta bersifat sukarela.
- e. membuka ruang kerja sama yang erat dengan DU/DI, di mana DU/DI dapat langsung terlibat dalam menginformasikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan memastikan kualitas program pendidikan dan pelatihan vokasi dimutakhirkan sesuai dengan standar industri;
- f. membentuk forum kerja sama DU/DI dengan lembaga pendidikan yang relevan agar setiap program pendidikan vokasi baik di SMK, pendidikan tinggi vokasi, maupun kursus dan pelatihan menghasilkan kompetensi lulusan yang standarnya diakui oleh industri;
- g. mengembangkan beberapa SMK menjadi *Centers of Excellence* guna mempercepat peningkatan kapasitas guru dan pembelajaran siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia;
- h. meningkatkan kualitas pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan vokasi dengan metode *problem-based learning* agar peserta didik dapat mengembangkan *technical skills* dan *soft skills* sesuai dengan standar DU/DI;
- i. mendorong kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen usaha pimpinan (kepala sekolah, direktur) dalam mengembangkan institusi pendidikan dan pelatihan vokasi;
- j. memberikan kesempatan praktisi industri/profesional untuk mengajar di pendidikan dan pelatihan Vokasi;
- k. memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk melakukan praktik kerja industri dan/atau project work dengan DU/DI;
- l. memberikan kesempatan profesional atau pekerja untuk kembali ke institusi Pendidikan vokasi dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
- m. membuat mekanisme insentif yang transparan untuk DU/DI yang terlibat;
- n. menggali kerja sama yang sinergis dan kolaboratif dengan pemerintah daerah penyelenggaraan Pendidikan SMK.

### 3. Peningkatan Relevansi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah:

- a. perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja terlaksana;
- b. kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja meningkat.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud untuk mencapai perencanaan layanan pendidikan vokasi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja adalah:

- a. memastikan keterlibatan DU/DI dalam merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan standar DU/DI, termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas SDM (guru/instruktur/dosen/kepala sekolah/pimpinan), pemutakhiran fasilitas, dan asesmen terhadap hasil pembelajaran peserta didik;
- b. memfasilitasi exchange of information dari DU/DI dan pendidikan dan pelatihan vokasi mengenai kebutuhan kompetensi atau profesi di pasar tenaga kerja melalui platform yang dapat digunakan seluruh peserta didik;
- c. melakukan analisis terhadap relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi melalui data yang dikumpulkan dari lulusan Pendidikan vokasi melalui tracer study;
- d. mengembangkan kurikulum pada SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan (1) Permintaan pasar dan kebutuhan DU/DI (demand driven); (2) Kebersambungan (link) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan serta; dan (3) Kecocokan (match) antara pekerja dengan pemberi kerja;
- e. mengembangkan asesmen kompetensi peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan DU/DI;
- f. menjalankan program penempatan kerja dan praktek kerja industri langsung dengan DU/DI;
- g. mendatangkan pengajar dari DU/DI atau praktisi industri untuk mengajar di SMK dan pendidikan tinggi vokasi;
- h. memfasilitasi pengalaman langsung dan pelatihan di industri bagi guru/instruktur SMK dan dosen/instruktur pendidikan tinggi vokasi;
- i. meningkatkan keterhubungan/kesinambungan antara program studi vokasi dari jenjang Pendidikan SMK dan pendidikan tinggi vokasi;
- j. mengembangkan fleksibilitas pendidikan vokasi dan pendidikan akademik melalui skema *Multi Exit, Multi Entry System*, untuk pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan dunia kerja;
- k. memberikan otonomi yang lebih besar bagi SMK untuk berinovasi dan berkembang;
- l. mendorong peningkatan citra pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan media dan praktisi komunikasi;

- m. mendorong SMK dan pendidikan tinggi vokasi untuk berbagi sumber daya seperti guru/instruktur dan sarana prasarana praktik (bengkel, lab) khususnya yang memiliki bidang keahlian yang sama; dan
- n. melakukan aktivitas pembelajaran bersama DU/DI seperti riset gabungan (joint research) dan/atau proyek (project work) berdasarkan permasalahan riil di masyarakat.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan kesiapan bekerja siswa untuk memasuki dunia kerja adalah:

- a. memberikan kesempatan DU/DI untuk turut memberikan pengakuan terhadap kompetensi peserta didik di SMK, pendidikan tinggi dan pelatihan melalui sertifikasi;
- b. selain memastikan pengembangan *technical skills*, juga menitikberatkan pengembangan *soft skills*, penanaman *values* budaya kerja, serta kemampuan berwirausaha pada kurikulum SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi, sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja;
- c. mendorong pembelajaran, *project work*, riset terapan dan inovasi berbasis DU/DI melalui pengembangan *teaching factory* dan *teaching industry* agar sekolah bermitra dengan pelaku DU/DI agar peserta didik tidak hanya belajar berproduksi tetapi memastikan hasil produksinya memenuhi standar industri;
- d. memfasilitasi praktik kerja industri dan/atau *project work* peserta didik baik di SMK;
- e. menata asesmen kompetensi peserta didik dalam mendorong kesiapan kerja;
- f. memperlengkapi tenaga pendidik dan kependidikan di SMK, dan instruktur di pelatihan vokasi dengan kemampuan mengembangkan kompetensi teknis dan non-teknis peserta didik mereka;
- g. memastikan perangkat pembelajaran beserta fasilitas sarana dan prasarana dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang dikembangkan bersama DU/DI dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi peserta didik yang mumpuni;
- h. menggerakkan dukungan DU/DI terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi melalui koordinasi K/L terkait dan pemerintah daerah;
- i. memfasilitasi penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman peserta didik terkait dunia kerja melalui platform teknologi;
- j. menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi dan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.

#### 4. Penguatan Tata Kelola Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penguatan tata kelola pendidikan adalah:

- a. implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI, menguat;

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka memperkuat implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI adalah:

- b. mengundang partisipasi DU/DI dalam penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi, penyelarasan kompetensi pendidik dan peserta didik dengan kebutuhan industri, pemagangan dan praktek kerja di industri, serta penyerapan lulusan pendidikan vokasi.

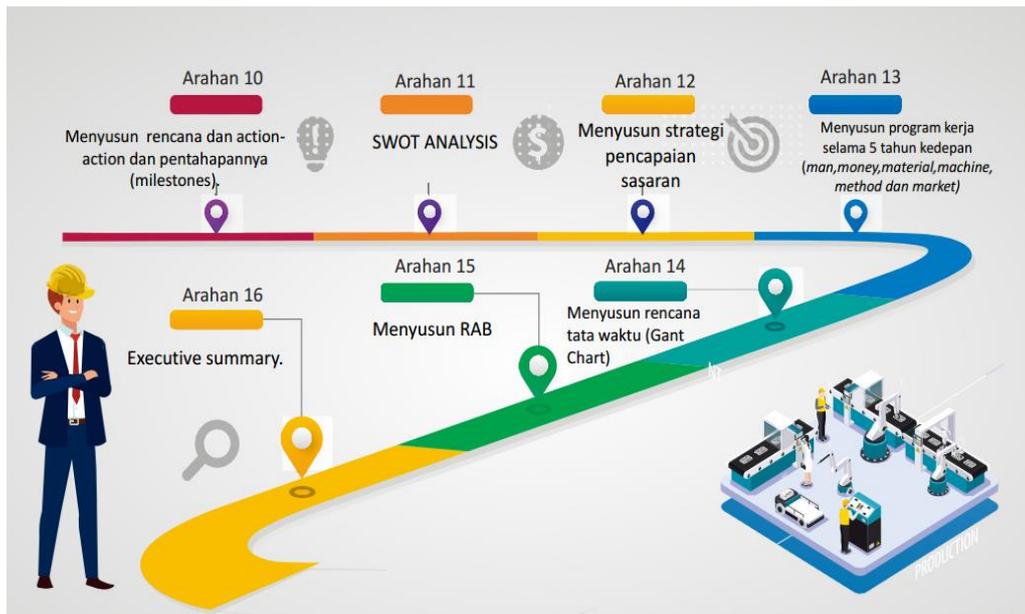


Gambar 3.2. Tantangan Pendidikan Vokasi masadepan

Oleh karena itu, Dirjen Diksi memberi arahan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan diatas sebagaimana terlihat dalam gambar dibawah.



Gambar 3.3. Arahan Dirjen Diksi



Gambar 3.3. Arahan Dirjen Diksi (2)

### 3.2. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud merencanakan beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan. BBPMPV Pertanian akan memberikan kontribusi sesuai bidang tugas pada periode waktu tahun 2020-2024. Mengacu pada Renstra Kemendikbud 2020-2024, maka kerangka regulasi yang sesuai bidang tugas BBPMPV Pertanian, adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.1. Kerangka Regulasi Kemendikbud**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Peran BBPPMPV Pertanian
1	Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	<p>Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.</li> <li>2. Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan.</li> <li>3. Konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka);</li> <li>4. Standar pendidikan.</li> <li>5. Wajib Belajar 12 tahun.</li> <li>6. Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka/online).</li> <li>7. Kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing. Pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik).</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)</li> <li>• Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.</li> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</li> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.</li> <li>• Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri.</li> <li>• Kementerian Agama.</li> <li>• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</li> </ul>	Memberikan masukan dan dukungan data dan informasi terkait potensi dan permasalahan SMK Pertanian.

Sumber: Renstra Kemendikbud 2020-2024

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung oleh regulasi yang memadai sebagai legalitas operasionalisasi dari arah kebijakan BBPPMPV Pertanian. Kerangka regulasi diarahkan untuk penyediaan peraturan perundangan yang terkait dengan pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah identifikasi Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen maupun Keputusan Dirjen yang terkait dengan kegiatan, termasuk dalam rangka menciptakan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antara pusat dan daerah. Berikut dijabarkan kerangka regulasi yang terkait dengan Program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mengawal tercapainya arah kebijakan, strategi dan Sasaran Strategis BBPPMPV Pertanian 2020 - 2024 serta urgensinya.

1. Perbaiki regulasi untuk perekrutan SDM Pendidikan Vokasi yang tidak hanya berbasis kualifikasi pendidikan dan latar belakang akademik
  - a. Perbaiki sistem perekrutan PTK Pendidikan Vokasi agar memenuhi target 30-40% PTK akademik dan 60-70% PTK vokasi pada suatu satuan pendidikan;
  - b. Perbaiki sistem perekrutan PTK Pendidikan Vokasi melalui skema PTK dari industri setelah lulus kursus didaktik metodik dalam pengembangan bahan ajar sesuai kurikulum selaras dengan KKNI;
  - c. Program magang bagi PTK vokasi di industri yang memiliki reputasi pengembangan produk dan inovasi.
2. Perbaiki sistem akreditasi Pendidikan Vokasi yang memperhatikan kualitas luaran dan pengukuran proses yang berkaitan dengan maksud dan tujuan pendidikan vokasi Strategi:
  - a. Pembentukan *board* akreditasi pendidikan vokasi yang terdiri dari unsur industri dan institusi pendidikan;
  - b. Penyusunan borang akreditasi vokasi;
  - c. Otonomi pendidikan vokasi;
  - d. Perjanjian kerja sebagai sasaran mutu tahunan;
  - e. Pelaporan keuangan berbasis akuntan publik;
  - f. Insentif bagi kinerja institusi unggul;
3. Perlu dibentuk regulasi tentang implementasi merdeka belajar.
4. Mengadopsi standarisasi ISO 9001, ISO 21001, dan sertifikasi internasional agar kompetensi lulusan dapat diserap pasar global.

### 3.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Pertanian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan untuk: (i) meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan fungsi dan visi/misi BBPPMPV Pertanian; (ii) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Berdasarkan Permendikbud nomor 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang didalamnya termasuk Organisasi dan Tata kerja BBPPMPV. BBPPMPV menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
2. pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi;
3. pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
4. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi;
5. pengelolaan data dan informasi;
6. pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
7. pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; dan
8. pelaksanaan urusan administrasi.

#### 3.3.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan pada tugas dan fungsi tersebut, dalam rangka melakukan aktifitas operasionalnya, organisasi BBPPMPV Pertanian terdiri atas:

1. Kepala Balai Besar
2. Bagian Tata Usaha

Selanjutnya, dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BBPPMPV Pertanian, Kepala BBPPMPV Pertanian menetapkan Surat Keputusan Kepala BBPPMPV Pertanian No. 2121/B6.4/HK/2020 Tentang Pengangkatan Koordinator/Sub Koordinator dan Urusan Bagaian Tata Usaha Di Lingkungan BBPPMPV Pertanian Periode 2020 - 2022. Struktur Organisasi BBPPMPV Pertanian dalam SK tersebut adalah sebagai berikut:

**Bagan 3.1. Struktur Organisasi BBPPMPV Pertanian**  
 (Permendikbud No. 26 Tahun 2020 dan SK Kepala BBPPMPV Pertanian No. 2121/B6.4/HK/2020)



### 3.3.1 Pengelolaan SDM

Pengejawantahan visi dan misi lembaga yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh warga yang ada merupakan hal penting yang mesti terjadi. Oleh karena itulah BBPPMPV Pertanian berusaha keras untuk dapat melakukan optimalisasi peran dan fungsi setiap individu warga lembaga secara menyeluruh. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan Kemendikbud. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis dan terukur.

Disamping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Kemendikbud juga merupakan hal yang sangat penting. Dengan semangat perubahan menuju ke arah organisasi modern dan lebih baik, strategi pengelolaan SDM di BBPPMPV Pertanian Cianjur diorientasikan pada beberapa komponen kerja atau tugas sebagaimana tercantum di bawah ini:

- (1) Pengembangan Struktur Organisasi, terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Kabag Tata Usaha
    - Urusan Tatalaksana dan Kepegawaian
    - Perencanaan dan Penganggaran
    - Urusan Tatalaksanaan dan Rumah Tangga

- c. Tiga Koordinator
  - Pengembangan Penjaminan Mutu Diksi Pertanian
    - o Sub Koordinator Program Penjaminan Mutu
    - o Sub Koordinator Pokja Tatalaksanaan Penjaminan Mutu
  - Program dan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi PTK
    - o Sub Koordinator Program Peningkatan Kompetensi PTK
    - o Sub Koordinator Tatalaksana Peningkatan Kompetensi PTK
    - o Sub Koordinator Evaluasi Peningkatan Kompetensi PTK
  - Kemitraan Pengembangan Inovasi dan TIK
    - o Sub Koordinator Kemitraan
    - o Sub Koordinator Pengembangan Inovasi dan TIK
  - Ketua Pengembangan
    - o Pengembangan Agribisnis Perikanan
    - o Pengembangan Agribisnis Peternakan
    - o Pengembangan Agribisnis Tanaman dan Kehutanan
    - o Pengembangan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
    - o Pengembangan Sains Terapan dan Otomasi Pertanian
- d. Jabatan Fungsional
  - Widyaiswara
  - Pengembang Teknologi Pembelajaran
- e. Jabatan Fungsional Umum

(2) Analisis Jabatan

Dinamika Organisasi seiring dengan perubahan regulasi menghendaki adanya penyesuaian posisi dan pekerjaannya. Melalui analisis jabatan akan ditemukan kebutuhan (*needs*) organisasi yang saat ini betul-betul dibutuhkan dalam mendukung penguatan kinerjanya.

(3) *Staffing*

Pembagian SDM agar dapat ditempatkan sesuai dengan minat, keinginan dan kompetensinya mutlak menjadi hal yang sangat penting. Dengan rotasi dan juga seleksi yang tepat tentu akan mengakibatkan kekuatan organisasi menjadi kuat dan akselerasinya meningkat.

(4) Pembagian Tugas dan Wewenang (*job description*)

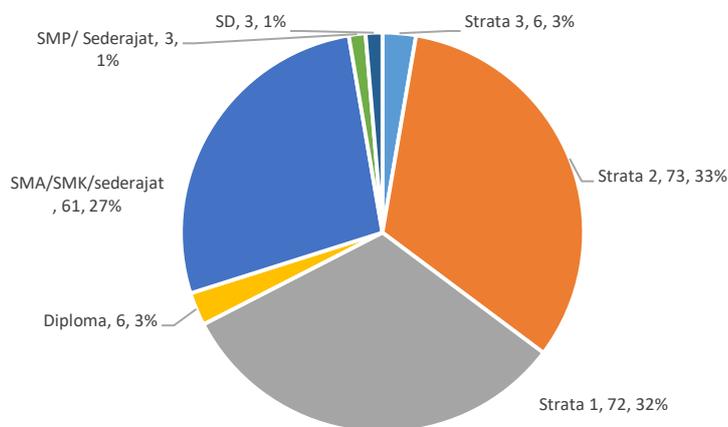
Tugas pokok dan fungsi masing-masing staf atau SDM merupakan hal yang mendasar dalam menciptakan harmonisasi kerja seluruh warga. Masing-masing SDM mampu memahami sehingga dapat langsung bertanggungjawab terhadap tugas, peran dan fungsinya dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kelembagaan secara masif.

(5) Sistem Pengawasan Internal

Selain sebagai tim yang bekerjasama dengan seluruh komponen struktur lainnya dalam mengembangkan kualitas kinerja BBPPMPV Pertanian, SPI juga diharapkan mampu menjadi faktor penentu terjaminnya mutu layanan lembaga.

**Grafik 3.1. Komposisi SDM Berdasarkan jenjang Pendidikan**

Berbagai program pengembangan kompetensi SDM perlu dilaksanakan setiap tahun untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan SDM yang dapat memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan lembaga



### 3.4. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Kemendikbud merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbud. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Sebagai unit pelaksana teknis yang mengemban amanat dalam membangun dan meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, BBPPMPV Pertanian berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Kemendikbud Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies dan soft competencies*), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi.

Selain itu, BBPPMPV Pertanian juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi enam dari delapan area perubahan, yakni:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tatalaksana
3. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

# BAB 4

---

## **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**



## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemendikbud serta revitalisasi pendidikan vokasi untuk mencapai Visi Indonesia 2024 dan RJPMN 2020 – 2024, BBPMPV Pertanian menetapkan tujuan strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap tujuan strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan.

**Tabel 4.1.**  
**Target Kinerja Sasaran Strategis BBPMPV Pertanian Periode Renstra 2020 – 2024**

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan (2020)</b>						
IKS Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru	orang	3.610	-	-	-	-
<b>SS 1. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi berbasis kerja sama industri (2021 – 2024)</b>						
IKS 1. Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan <i>Upskilling</i> dan <i>Reskilling</i> berstandar Industri	Orang	-	640	686	734	786
IKS 2. Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri	Orang	-	330	110	110	110
IKS.6. Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	Model	-	20	22	24	26
<b>SS 2 Meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi</b>						
IKS 7. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	78	80	82	85	87
IKS 8. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Predikat	93	94	95	95	98

## 4.2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan BBPMPV Pertanian dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud dibagi ke dalam dua periode yakni:

- a. Periode tahun 2020; dan
- b. Periode tahun 2021 – 2024, berdasarkan restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga.

Kebutuhan pendanaan periode pertama tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.2 sebagai berikut.

**Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis BBPMPV Pertanian 2020**

No.	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. Miliar)
1	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	51.255.473.000 ,00

Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2021-2024 mengikuti restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga, tertuang pada Tabel 4.3 sebagai berikut.

**Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis BBPMPV Pertanian 2021 – 2024**

No.	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. Miliar)				Jumlah (2020-2024)
		2021	2022	2023	2024	
1.	Program Pendidikan Vokasi	76.893.243.000	82.275.770.010	88.035.073.911	94.197.529.084	341.401.616.005

# BAB 5

---

**PENUTUP**

A thick yellow curved line starts from the bottom right corner and curves upwards and to the left, ending near the center of the page.

## BAB V PENUTUP

Renstra BBPPMPV Pertanian ini disusun dalam rangka mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi fokus Presiden dan Wakil Presiden pada RPJMN. Mengacu pada Renstra Kemendikbud dalam upaya membawa perubahan:

- (1) penekanan fokus pada mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik;
- (2) pengembangan karakter peserta didik;
- (3) penekanan pada perluasan akses pendidikan bermutu, terutama melalui afirmasi yang berkeadilan dan inklusif;
- (4) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan dan kebudayaan, termasuk penguatan peran Kemendikbud sebagai kementerian pusat yang memiliki mandat menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria untuk diikuti oleh pemerintah daerah selaku pelaksana layanan pendidikan dasar dan menengah.

Rencana Strategis ini telah menjabarkan visi dan misi Kemendikbud beserta sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Presiden dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, Renstra Kemendikbud menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis Kemendikbud, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra BBPPMPV Pertanian digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan vokasi yang hendak dicapai pada periode 2020-2024. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil dan dampak yang baik dalam lima tahun mendatang. Renstra ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata.

# LAMPIRAN

---



**Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan**

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target					Alokasi (Rp Miliar)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
023.16.13	Program Guru dan Tenaga Kependidikan							51,25				
SK	<b>Peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan (2020)</b>											
IKK	IKSS Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak	orang	3.610	-	-	-	-					
4262, 4264	<b>Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri</b>								76,89	82,27	88,03	94,19
SK	<b>SK 1 Meningkatnya jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri</b>											
IKK	IKS 1. Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan <i>Upskilling</i> dan <i>Reskilling</i> berstandar Industri	Orang	-	640	686	734	786					
IKK	IKS 2. Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri	Orang	-	330	110	110	110					
IKK	IKS.6. Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	Model	-	20	22	24	26					
SK	<b>SK 2 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan- Ditjen Pendidikan Vokasi</b>											
IKK	IKSS 2.1. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	78	80	82	85	87					
IKK	IKSS. 2.3 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	%	93	93	95	95	98					

## Lampiran 2: DEFINISI OPERASIONAL

Sasaran : Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan (2020)

Indikator Kinerja Sasaran : Persentase guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak

Definisi:	Metode Perhitungan:
<p>Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p>	<p>Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak diukur dengan membandingkan jumlah guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak dengan jumlah target Program Guru Penggerak seluruhnya atau target tahun 2020 (3.540 orang), dinyatakan dalam persen (%).</p> <p>Rumus:</p>
<p>Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.</p>	$\%gp = \frac{\sum g_{mengikuti}}{\sum gp_{target}} \times 100\%$ <p>Keterangan:  <math>\%gp</math> : persentase guru penggerak  <math>\sum g_{mengikuti}</math> = Jumlah guru yang mengikuti Pendidikan Guru Penggerak (guru SMK Pertanian dan Teknik Kimia)  <math>\sum gp_{target}</math> = Target jumlah Program Guru Penggerak seluruhnya/target tahun 2020 (guru SMK Pertanian dan Teknik Kimia)</p>
<p>Guru penggerak adalah guru yang menjadi agen-agen perubahan di masa depan akan menjadi calon-calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan calon pelatih program pelatihan guru.</p>	<p>Satuan : persen  Tipe perhitungan : kumulatif</p>
<p>Program Guru Penggerak adalah program pendidikan untuk guru yang bertujuan untuk menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya agar menjadi pendamping bagi rekan pengajar lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah.</p>	<p>Kompetensi guru penggerak dapat dilihat dari predikat hasil pelatihan yang dapat dinyatakan dalam satuan persen. Persentase predikat dapat diukur dengan membandingkan jumlah peserta dengan predikat tertentu dengan jumlah guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak.</p> <p>Rumus:</p>
<p>Pendidikan Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Dengan kata lain Guru Penggerak adalah suatu program pelatihan, program identifikasi dan pelatihan dan pembibitan calon pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan.</p>	$\%predikat_i = \frac{\sum g_{predikat_i}}{\sum g_{mengikuti}} \times 100\%$ <p>Keterangan:  <math>\%predikat_i</math> : persentase predikat <math>i</math>  <math>\sum g_{predikat_i}</math> = Jumlah guru yang mengikuti Pendidikan Guru Penggerak (guru SMK Pertanian dan Teknik Kimia) dan mendapatkan predikat <math>i</math>  <math>\sum g_{mengikuti}</math> = Jumlah guru yang mengikuti Pendidikan Guru Penggerak (guru SMK Pertanian dan Teknik Kimia)  <math>i</math> = predikat kelulusan berdasarkan klasifikasi nilai akhir (kurang, sedang, cukup, baik, amat baik)</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data:
<p>BBPPMPV Pertanian</p>	<p>Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan peningkatan kompetensi Guru.</p>

SK : Meningkatnya Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri (2021 – 2024)  
 IKK : Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan *Upskilling* dan *Reskilling* berstandar Industri

Definisi:	Metode Perhitungan:
<p>Program Upskilling dan Reskilling Guru SMK Berstandar Industri berfokus pada peningkatan kompetensi teknis/kejuruan/kerja bagi guru kejuruan SMK sesuai dengan kompetensi keahlian yang diajarkan di sekolah. Peserta Upskilling dan Reskilling adalah guru kejuruan yang berasal dari SMK baik negeri maupun swasta yang sekolahnya disiapkan menjadi SMK Pusat Keunggulan.</p> <p>BBPPMPV Pertanian menetapkan berbagai Kegiatan Diklat/ Peningkatan Kompetensi yang merupakan pendukung tercapainya Sasaran Startegis ini yang kan mendukung bertambahnya jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri. Sasaran utama yang mengikuti program ini adalah Guru Kejuruan.</p>	<p>Formula:</p> <p>Jumlah Guru Kejuruan yang mengikuti peningkatan kompetensi.</p> <p>Satuan: Orang</p> <p>Tipe perhitungan: Non Kumulatif</p>
<p>Adapun tema dari program Peningkatan Kompetensi tersebut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kompetensi bidang kejuruan Pertanian. Memberikan bekal pengetahuan dan pengembangan Pembelajaran Paradigma Baru, Budaya Kerja dan Gerakan Sekolah Menyenangkan, kemampuan produksi dan budaya kerja industri melalui magang di DUDIKA.</li> <li>Kurikulum yang dikembangkan pada tingkat satuan Pendidikan (Pendampingan Implementasi Pembelajaran)            Program SMK Pusat Keunggulan (PK) adalah program yang berfokus pada pengembangan serta peningkatan kualitas dan kinerja SMK dengan bidang prioritas yang diperkuat melalui kemitraan dan penyesuaian dengan dunia kerja untuk menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha dan menjadi SMK rujukan dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya</li> </ol>	
Unit Pelaksana	Sumber Data:
BBPPMPV Pertanian	Dokumen Pelaksanaan Evaluasi peningkatan kompetensi Guru.

**SK** : Meningkatnya Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri (2021 – 2024)  
**IKK** : Jumlah Kepala Sekolah Yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Manajerial Berbasis Industri

<b>Definisi:</b>	<b>Metode Perhitungan:</b>
<p>Program Peningkatan Kapabilitas Manajerial Kepala SMK berbasis Industri adalah program bagi kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sekolahnya baik dari sisi kurikulum, pembelajaran, SDM, sarana prasarana, tata kelola administrasi dan kewirausahaan dengan mengadopsi prinsip-prinsip praktik baik di industri, agar mampu merespon perkembangan dinamika IDUKA.</p> <p>Berdasarkan Perdirjen Pendidikan Vokasi No 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Kapabilitas dan manajerial Kepala Sekolah Berbasis Industri Tahun 2020, yang menjadi persyaratan mengikuti pelatihan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peserta Program Peningkatan Kapabilitas Manajerial Kepala SMK Berbasis Industri berasal dari SMK yang memenuhi kriteria:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Terdaftar dan melakukan update pada sistem dapodik secara berkala;</li><li>b) Memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan 4 bidang prioritas yaitu manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, layanan keramahan (hospitality), dan pelayanan sosial (care services);</li></ol></li><li>2. Kepala SMK calon peserta program, memenuhi kriteria:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Lolos seleksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI.</li><li>b) Bersedia mengikuti seluruh Program Peningkatan Kapabilitas Manajerial Kepala SMK Berbasis Industri.</li><li>c) Bersedia untuk mengimplementasikan hasil peningkatan kapabilitas manajerial di SMK tempat bertugas.</li></ol></li></ol> <p>Program ini didukung pula oleh peningkatan kompetensi beberapa komponen kelompok Tenaga Kependidikan lainnya, yaitu Pengawas, Tenaga Administrasi Sekolah, Laboran, Pustakawan. Seluruh Tenaga Kependidikan ini turut bersinergi dalam mewujudkan peningkatan mutu sekolah yang bestandar industri.</p>	<p>Formula:</p> <p>Jumlah Kepala SMK dan Tenaga Kependidikan lainnya yang mengikuti peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri.</p> <p>Satuan: Orang</p> <p>Tipe perhitungan: Non Kumulatif</p>
<b>Unit Pelaksana</b>	<b>Sumber Data:</b>
BBPPMPV Pertanian	Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan Lainnya.

SK : Meningkatnya Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri (2021 – 2024)  
IKK : Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan *Teaching Factory*

Definisi:	Metode Perhitungan:
<p><i>Teaching Factory</i> (TEFA) adalah pembelajaran yang berorientasi produksi dan bisnis. Pembelajaran melalui TEFA adalah proses penguasaan keahlian atau keterampilan yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk atau jasa yang dipesan oleh konsumen.</p> <p>SMK (negeri dan swasta) yang menerapkan pembelajaran <i>Teaching Factory</i> di sekolah, dalam melaksanakan proses pembelajaran seluruh civitas sekolah diharapkan mampu membawa budaya kerja industri sesuai dengan bidang keahlian.</p> <p>Pembinaan yang dimaksud adalah dalam bentuk bimbingan teknis, pelatihan, bantuan sarana prasarana, pendampingan baik dari Ditjen Vokasi maupun IDUKA.</p>	<p>Formula:</p> <p>Target IKK = Jumlah SMK yang mendapatkan pembinaan untuk mengembangkan <i>Teaching Factory</i></p> <p>Satuan: Sekolah</p> <p>Tipe perhitungan: Non Kumulatif</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data:
BBPPMPV Pertanian	Laporan Pelaksanaan Pembinaan SMK yang menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>